



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 378

SERI : A

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 29 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca : 1. Surat Bupati Nias Nomor 100.3/2281/Setda-Hkm/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Permohonan Persetujuan Tertulis untuk penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Rancangan Peraturan Bupati Nias;
2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.3.2/11471/2024 tanggal 18 Oktober 2024 hal Permohonan Persetujuan Tertulis untuk penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Rancangan Peraturan Bupati Nias;
3. Bukti Tertulis secara Elektronik pada Aplikasi e-perda Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Oktober 2024, menjelaskan jenis Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD (Induk, Perubahan, Pertanggungjawaban, Pergeseran) tidak memerlukan persetujuan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 30 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 31 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 35 Seri A);
25. Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 295 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 323 Seri E)
26. Peraturan Bupati Nias Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Berita Daerah Nomor 340 Tahun 2023 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	127.428.659.270,83	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	855.518.032.225,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan	Rp.	982.946.691.495,83	
2. Belanja			
a. Belanja Operasi :			
1) Belanja Pegawai	Rp.	303.620.136.939,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	253.187.606.552,75	
3) Belanja Bunga	Rp.	-,00	
4) Belanja Subsidi	Rp.	-,00	
5) Belanja Hibah	Rp.	7.459.486.812,00	
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-,00	
	Rp.	564.267.230.303,75	

b. Belanja Modal :		
1) Belanja Tanah	Rp.	-,00
2) Belanja Peralatan Mesin	Rp.	39.239.916.029,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	37.315.953.175,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp.	115.396.088.018,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.363.593.088,00
6) Belanja Aset Lainnya	Rp.	<u>-,00</u>
	Rp.	195.315.550.310,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.516.120.420,00
d. Transfer :		
1) Belanja Bagi Hasil, Pendapatan	Rp.	663.106.128,00
2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	<u>190.447.995.685,00</u>
	Rp.	<u>191.111.101.813,00</u>
Jumlah Belanja.....	Rp.	952.210.002.846,75
Surplus/defisit	Rp.	30.736.688.649,08
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Daerah	Rp.	92.740.755.962,78
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto.....	Rp.	<u>92.740.755.962,78</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	123.477.444.611,86

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 18 Oktober 2024
Pjs. BUPATI NIAS,

ttd

YULIANI SIREGAR

Diundangkan di Gido
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 378 SERI : A